

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASI
TANGKAP TANGAN (OTT) BERDASARKAN PROSES
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmed Faradlillah Shohib

NIM: C03215007



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmed Fradlillah Shohib
NIM : C03215007
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi
Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses
Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan



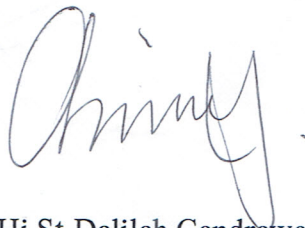
Ahmed Faradlillah Shohib
NIM. C03215007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmed Faradlillah Shohib NIM. C03215007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 juli 2019

Pembimbing Skripsi,



Dra.Hj.St.Dalilah Candrawati,MAG

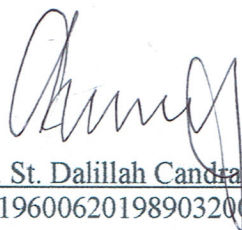
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmed Faradlillah Shohib NIM. C03215007 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

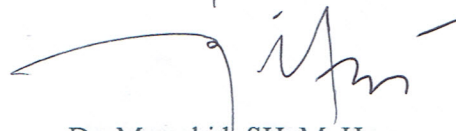
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dra. Hj. St. Dalillah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II

an. shifur RPT


Dr. Muwahid, SH, M. Hum.
NIP.197803102005011004

Penguji III



M. Romdlon, SH, M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Penguji IV



Dr. Holilur Kohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmed faradlillah Shohib
NIM : C03215007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : shohibahmed628gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN
(OTT) BERDASARKAN PROSES PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif inii Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2019

Penulis

(Ahmed faradlillah Shohib)

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyandapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana prosedur penyandapan oleh KPK dan implikasinya bagi pihak yang disadap. Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan penyandapan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian riset pustaka (library research). Kemudian data diolah dan di analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: prosedur penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu diawali dengan adanya pengaduan masyarakat, setelah KPK mendapat aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Langkah yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di dikeluarkan itu mencakup, penyelidikan, peyidikan dan penuntutan bisa dengan melakukan penyadapan. Berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK berwenang malakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya di dasarkan pada keterangan atau sumber yang jelas, karena jika tidak bisa menunjukkan keterangan atau sumber yang jelas, maka penyandapan yang dilakukan akan berdampak pada pelanggaran HAM. Menurut hukum pidana Islam penyadapan termasuk jarimah tajassus sebab perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahuluh dan dapat dikenakan sanksi dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun tajassus boleh dikakukan asalkan ada kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, dalam konteks penegakan hukum, penyandapan yang dilakukan oleh KPK apabila dipandang dari kaidah istihsan maka diperbolehkan dengan dasar agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa masalah tajassus atau penyandapan dalam hukum pidana Islam perlu juga untuk dimasukkan teori-teori dalam rumusan undang-undang yang akan datang, agar kaidah-kaidah hukum Islam berlaku dalam hukum positif Indonesia. Idealnya aturan terkait penyandapan diatur secara lebih rincil lagi dengan alasan agar tidak timbul tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang akan melakukan penyadapan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	8
C. Batasan masalah	9
D. Rumusan masalah.....	9
E. Kajian pustaka	10
F. Tujuan penelitian	12
G. Kegunaan hasil penelitian.....	12
H. Definisi operasional.....	13
I. Metode penelitian	14
J. Sistematika pembahasan.....	18

3. Dasar hukum tajassus	21
B. Hukuman ta'zir dalam jarimah tajassus	22
1. Pengertian jarimah ta'zir dan unsur –unsur nya	22
a. Pengertian jarimah ta'zir	22
b. Unsur-unsur jarimah ta'zir	25
2. Macam-macam jarimah ta'zir dan hukumannya	27
a. Macam-macam jarimah ta'zir.....	27
b. Hukuman jarimah ta'zir.....	29
3. Hukuman ta'zir bagi pelaku tajassus.....	41
C. Kaidah istihسان	42
1. Pengertian istihسان	42
2. Macam-macam istihسان.....	44
 B III OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) BERDASARKAN PROSEDUR PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	

**BAB III OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) BERDASARKAN PROSES
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK).**

xi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.¹

Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.⁴

²<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahliaterlengkap.html> (diakses tgl 25 Agustus 2018, 16:15).

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat 1 (UU Tipikor).

[illegible]

Akhir-akhir ini salah satu lembaga negara terkenal di Indonesia yang dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi ramai dibicarakan. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. dan juga merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁷ KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Intinya KPK harus menjadi landasan yang kuat secara substantif maupun implementatif sehingga merupakan salah satu institusi yang mampu mengembangkan misi penegakan hukum.⁸ KPK juga memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan.

⁸ Syarif Fadillah, *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Cetakan Kedua, Oktober 2009), 22.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.¹¹

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artinya: Waspadalah dengan buruk sangka karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta.” (HR. Bukhari no. 5143)¹⁴

Dalam pandangan Islam, penyadapan secara terminologi mendekati jarimah tajassus, yang mana jarimah tersebut dapat dikenakan hukuman *tak'zir* yaitu sanksi atas jiwa seseorang dengan bentuk hukuman mati. Namun, apabila tajassus dilakukan demi kemaslahatan sebagaimana menyadap guna kepentingan hukum maka secara kaidah istihsan diperbolehkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan OTT patut dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan orang secara sewenang-wenang. Oleh karena itu peneliti menentukan judul penelitian yaitu Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) yaitu :

1. Aturan operasi tangkap tangan KPK
2. Penerapan Pasal 11 huruf C Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002

¹⁴ Shahih Al-Bukhary, Jus VII, Hadis No. 5143, 24.

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini, diantaranya :

¹⁵ Muhammad Rizal Akbar, *Kebijakan Kpk dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Oprasi Tangkap Tangan* (Bandar Lampung, Unerfisitas Lampung, 2016).

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan *analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK)* adalah sebagai berikut :

1. Teoretis, yaitu memperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun argumentasi bagi peneliti lapangan mengenai analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). maka inilah yang dijadikan objek penelitian.
2. Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait. Masalah yang ditulis dalam skripsi ini yaitu dalam peraturan yang mengatur Penyadapan dan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah judul dan konteks pembahasan yang diteliti serta menghindari adanya salah tafsir, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- [illegible]

komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau komunikasi elektronik lainnya.

4. KPK terbentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi di beri tugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
5. Istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

- ### 1. Data yang dikumpulkan

Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah :

- a. Data yang berkaitan dengan undang – undang hukum pidana terkait operasi tangkap tangan.
- b. Data yang berkaitan tentang operasi tangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi.
- c. Data yang berkaitan dengan syarat- syarat operasi tangkap tangan.

- d. Data yang berkaitan dengan teknis penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Sumber data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.¹⁸ Dalam penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut :

1) Sumber Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) BAB I Amandemen Ketiga.
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ,Pasal 2ayat (1)UU Tipikor.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d) KUHAP Pasal 1 ayat 19 Undang –Undang tentang Operasi Tangkap Tangan.
- e) Undang – Undang nomor 1 tahun 2008 informasi dan Transaksi dan elektronik.

2) Sumber Sekunder, yaitu :

- a) Adrian Sutendi. *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika)2010.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 129.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبُو غُمَيْسٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ الْأَكْوَءِ، أَيْ بِهِ قَالَ: (أَيْ تِي النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٍ مِنَ الْمَشْرُكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فُجِّلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ اُنْسِلَ فَقَالَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اطْبُؤْهُ فَا قُتِّلُوهُ)) قَالَ: فُسِّبَتْهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَاحِدًا ثُمَّ سَلَبَهُ

فُنْقِلْنِي أَيَّاهُ (رَوَاهُ: سَلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَكْوَيْ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata: telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad saw. dan ia sedang dalam perjalanan, kemudian ia duduk di sisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi Muhammad saw. berkata: Carilah dia dan bunuhlah. Salamah bin Al Akwa' berkata: kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan. (HR Salamah bin Amru bin al Akwa)⁵

Dari paparan di atas bahwa *tajassus* atau memata-matai dilarang oleh islam hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu bahkan para pelaku atau *jasus* akan mendapat hukuman mati sebagai mana yang tercantum dalam hadits di atas.

B. Hukuman *ta'zir* dalam *Jarimah tajassus*

1. Pengertian *jarimah ta'zir* dan unsur-unsurnya

a. Pengertian *jarimah ta'zir*

⁵ Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Asy'ats, Sunan Abu Dawud cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 110 (Bairut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1996M), 203.

Ta'zir menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi عَزَّرَ yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *Ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁷

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang

⁷ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 164-165.

Dalam hukum pidana Islam, *Ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarimah Ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat di anggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Demikian pula sesuatu yang dianggap maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain.

⁹ Mustofa Hasan, M.Ag. *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia 2013), 75.

- f) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

B. Hukuman *jarimah ta'zir*

- 1). Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, di bedakan menjadi dua, yaitu:
- a). Hukuman mati.

Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku jarimah dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad saw. beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagian sanksi *ta'zir* tertinggi.

Sedangkan contoh sanksi bagi spionase (mata-mata) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, misalnya koruptor yang tidak henti-hentinya melakukan korupsi yang berdampak merugikan negara. meskipun hukuman mati masih di golongan sebagai *ta'zir*, akan tetapi masih banyak orang yang melanggarnya, tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan yaitu hukuman mati.¹⁶

Dari uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi untuk *jarimah ta'zir*, dan hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ Al-Syirazi, *AL-Muhdzab*, jilid II, 268.

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir*, ulama berbeda pendapat:

- (1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *had*.
- (2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena *had* bagi peminum Khamar adalah di cambuk 40 kali.
- (3) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena *had* bagi pelaku *qadzaf* adalah di cambuk 80 kali.¹⁸
- (4) Ulama Malikiyah, sanksi *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin al-Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* yaitu:

- (1) Ulama Hanafiyah, batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
- (2) Ulama lain menyatakan batas terendah satu kali cambukan.
- (3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat di tentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
- (4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan

¹⁸ Ibnu Humam, Farh Al-Qadir, IV, 113.

Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya di jatuhkan bagi perbuatan di nilai ringan atau sedang. Walaupundalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang di nilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman di kategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang di nilai berat.²⁰

Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.

(1). Hukuman penjara terbatas

²⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 596.

a) Peringatan keras

Ta'zir sebagai hukuman, di jatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai *Jarimah ta'zir*. Hakim dapat memberikan beberapa macam sanksi *ta'zir* kepada pelaku Jarimah berdasarkan pertimbangannya.³⁵

Kegiatan penyadapan, memata-matai atau *tajassus* dalam hukum Islam sangatlah dilarang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.³⁷

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya di berikan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali,

³⁷ Ibid., 147.

berkaitan dengan jiwa, keamana, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi pelaku *tajassus*, karena pelaku *tajassus* sangatlah meresahkan masyarakat.³⁸

C. Kaidah istihsan

1. Pengertian istihsan

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu. Atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu استحسن (astahsin) berarti saya menganggap baik. Arti lain dari istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.³⁹

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti.

³⁸ Ibid., 149

³⁹ Umar Hubeis dan A. Yazid, *Fiqh al-Lighah al-‘Arabiyah* Jilid II (Cet. IX; Surabaya; Pustaka Progresif, 1985), 187.

Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.⁴⁰

Istilah istihsan dikalangan Ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Sarkhasi⁴¹

العمل بالاجتهاد و غائب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكو لا لنص الي ارائنا

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada kita.

Istihsan menurut ulama Malikiyah di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh al-Syatibi.

و هو في مذ هب ما لك الاخذ بمصلحة جزئية قى مقابلة دليل كلى

Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka dapat ditemukan esensi istihsan ada dua:⁴²

- a. Mentrarjih qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang mendukungnya.
- b. Memberlakukan pengecualian hukum juz'iyah daripada hukum kulli atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.

⁴⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), 15.

⁴¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 265.

⁴² Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), 130-133.

Istihsan yang disandarkan kepada urusan membersihkan sumur yang terkena najis sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, dibersihkan lagi, karena alat untuk membilas najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi

- mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi k
- Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang b
- memudahkan urusan manusia.

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) BERDASARKAN PROSES
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

1. Definisi Operasi Tangkap Tangan (OTT)

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang di duga keras telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut yang menunjukkan bahwa dia adalah tersangkanya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”¹

Soal pertama terkait apakah “Tertangkap Tangan” itu termasuk norma atau norma hukum. Untuk menjawabnya perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan norma. Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau pedoman tentang bagaimana subyek berperilaku. Norma khususnya norma hukum selalu memuat 3 (tiga) kemungkinan yaitu :²

- Apa yang tidak boleh dilakan (*verbod*)
- Apa yang harus dilakukan (*gebod*)
- Apa yang boleh dilakukan (*mogen*)

¹ KUHAP Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang tentang Operasi Tangkap Tangan.

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 34.

- [illegible]

Jika ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6(enam) ketentuan lainnya yang memuat istilah “tertangkap tangan” akan dapat di simpulkan bahwa keberadaan istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma keharusan atau larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 KUHAP misalnya mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, mengecualikan pasal syarat subyek yang berwenang melakukan penangkapan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang dalam pasal tersebut disebutkan Petugas Kepolisian RI menjadi boleh juga dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan.⁴

⁴ Ibid.

Apakah “Operasi Tangkap Tangan“ sama dengan “Tertangkap Tangan “, jawabnya jelas tidak Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah “pelaksanaan rencana yang telah di kembangkan”.⁵

Dari pengertian ini jelas bahwa “Operasi Tangkap Tangan” memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Tidak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakan. Kalaupun KPK menyebutnya dengan istilah lain misal “Operasi Kuda Lumping” atau “Operation Delta Force”, sah –sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHP adalah salah besar.⁶

Untuk menilai apakah “Operasi Tangkap Tangan” yang di lakukan KPK, Polri, dan Kejaksaan melanggar norma –norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun UU KPK, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI dan UU Tipikor, maka tentu harus dilihat apa tindakan–tindakan konkrit yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus–kasus konkrit.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT, Petugas Polri melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat di uji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan.

Misalkan ternyata Petugas Polri yang melakukan penangkapan tersebut

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat 3 (tiga) arti “Operasi “, yaitu:1) Bedah:2) Tindakan atau gerakan militer:dan 3) Pelaksanaan rencana yang telah di kembangkan Dalam konteks OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga.

⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 60.

dilakukan tanpa surat perintah yang di persyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, padahal peristiwanya tidak tertangkap tangan, namun katakanlah 1 (satu) hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka “Operasi Tangkap Tangan “.

Contoh lain, dalam suatu OTT Petugas Polri langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka tanpa surat perintah penahanan (Sprint-Han) dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan. Tindakan penahanan tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka, bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya Surat Perintah Penahanan (Sprint –Han) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

2. Dasar Hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Adapun dasar hukum Operasi Tangkap tangan (OTT) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya OTT tidak ada dasar hukumnya. Namun, dasar hukum “Tertangkap Tangan” ada diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP.

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu⁷:

- a. Sedang melakukan tindak pidana
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
- c. Sesaat kemudian di seruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau

⁷ Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan wewenangya dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berhak melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang di curigai tersebut telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Undang-Undang anti korupsi.⁸

Setelah dirasa cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk menindak *represif* dan mencegah *preventif*.⁹ Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat melakukan suatu

⁹ Deni Seryawati, *KPK Pemburu Korrupor* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), 30.

mekanisme penangkapan dengan cara melakukan Operasi Tangkap Tangan. Dalam praktek terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan.¹⁰

B. Deskripsi operasi tangkap tangan (OTT) oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sendiri tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP mengatur penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.

OTT juga mengandung makna kontradiksi atau berlawanan, dan mengacaukan istilah hukum.¹¹

Disini penulis memperjelas lagi tentang data-data yang penulis dapat dari pasal yang selalu menjadi rujukan Komisi Pemberantasan Korupsi, di dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu pasal 1 ayat 19 KUHAP, menerangkan tentang “Tertangkap tangan”.

¹⁰ <http://adrirahman24.blogspot.sg/2016/01/kronologi-suap-kepada-akil-mochtar.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:21 WIB.

¹¹ <http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacauan-hukum-acara>, (diakses tanggal 25 November 2018,16:40).

Dari ketentuan pasal 1 butir 19 KUHAP ,terlihat adanya penjelasan yang lebih luas tentang “Tertangkap Tangan” dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:

- Penggunaan kalimat “atau” setelah unsur pertama, menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya

[illegible]

perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi sudah dapat dianggap perbuatan tertangkap tangan.

Perbedaan yang sangat mendasar dalam unsur pasal 1 butir 19 KUHAP terdapat pada unsur ke-empat yaitu “atau sesaat kemudian pada orang tersebut di temukan benda yang diduga keras telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya”, yang mungkin pengertian ini tidak terdapat dalam benak pikiran orang awam dan juga tidak termasuk dalam pengertian KBBI dan Kamus Hukum.

Unsur ke-empat Pasal 1 butir 19 KUHAP tidak membutuhkan adanya perbuatan pidana yang di pergoki atau diseruhkan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan. yang terpenting terkait unsur ke-empat ini adalah ditemukannya sebuah benda yang diduga keras di pergunakan untuk melakukan tindak pidana, sesaat setelah tindak pidana dilakukan, yang menunjukan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah pelakunya.

Sehingga dalam unsur ini perlu dipastikan keterkaitan antara barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat tertangkap tangan. Selain itu tidak ada keterangan tentang “sesaat kemudian”. Apakah sesaat kemudian tersebut pada hari yang sama, ataukah dapat juga dihari-hari yang lain, tetapi yang terpenting adalah dapat dibutikannya korelasi antara barang bukti yang di temukan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan.

Sehingga karakteristik ketentuan “Tertangkap Tangan” sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tidak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, di mana kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide Pasal 18 ayat (2) KUHAP) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat di tangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa: “dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.¹³

[illegible]

Mengapa penyelidikan itu perlu di bahas. Karena agar kesalahan- kesalahan dalam tugas penyelidikan ini dapat diminimalisir bagi kepentingan aparatur negara itu sendiri, maupun bagi kepentingan masyarakat umum, agar pemahaman batasan-batasan tindakan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dapat mengerti dengan baik.¹⁵

Tentang tata cara penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tentukan sebagai mana diatur dalam pasal 43-44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

-
- rtono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72.

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72.

- a. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan,
- b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat bahwa perkara tersebut di teruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat di limpahkan perkara tersebut kepada penyelidik kepolisian atau kejaksaan .
- c. Dalam hal penyelidikan di limpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan

[illegible]

perkembangan penyelidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁸

2. Pengertian Penyidikan

Pengertian Penyidikan yaitu upaya oleh KPK yang bertujuan untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang belum di ketahui identitas nya. Di dalam pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan: “penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁹

Di dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang di larang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.²⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur–unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), 171.

¹⁹ Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

²⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu di ketahui dari penyelidikannya.²¹

- a. Pemeriksaan tersangka dengan berdasarkan Undang –undang Nomor 30 tahun 2002 dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka
- b. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaiatan dengan tugas penyidikannya.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindak penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini.

[illegible]

- Adapun ketentuan selanjutnya yakni meliputi :

- ²³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), 172.

- a. Penyidikan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan suatu tindak pidana korupsi, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan,
- c. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera di hentikan. Dalam penjelasan pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

[illegible]

Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.²⁵

3. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan kewenangan yang di berikan oleh negara kepada lembaga penuntut kejaksaan dan KPK untuk melakukan penuntutan (claim) atau pertanggung jawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau Undang–Undang di Indonesia.²⁶

Didalam prosesnya. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.²⁷

Mengenai tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tentukan sebagai mana diatur dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- a. Penuntutan adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- b. Penuntutan umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi,

²⁵ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), 173.

²⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 78.

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

- c. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- d. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri, dan
- e. Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di periksa dan di putuskan.²⁸

Bahwasanya didalam Pasal 12 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, berwenang untuk:

- a. Melakukan penyandapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait

²⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

²⁹ Pasal 12 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

halnya di maksud dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi.

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan, dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁰

Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering di dahului dengan penyandapan dan pengebakan tentu dalam praktik lebih mudah daripada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK.

Karena setelah laporan masyarakat, maka penyelidik harus melakukan bukti dan keterangan (purbaket) yang tidak mudah sampai memperoleh bukti permulaan yang cukup (Bukperckp).³¹ Berikut ini penjelasan mengenai pengebakan dan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) :

³⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 71-72.

Tindakan penyandapan erat kaitannya dengan perlindungan hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Definisi penyandapan di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

[illegible]

(getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.³⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memperbolehkan penyandapan dan perekaman komunikasi guna menangkap dugaan tipikor senilai Rp 1 miliar.

b. Dasar hukum penyadapan

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyadapan di Indonesia, baik yang berbentuk undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Berikut ini tabel yang berisi peraturan terkait penyadapan yang disusun oleh Criminal Justice Reform:³⁵

N0	Peraturan	Keterangan isi peraturan
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Memberikan Kewenangan Kepada penyidik Porli untuk melakukan penyadapan dengan tujuan terkait tindak pidana Psikotropika. Izin di tunjukan pada Kapolri dengan jangka waktu penyandapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, namun tidak mengatur jangka waktu perpanjangan.
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	Hanya mengatur kewenangan penyidik untuk secara spesifik bertujuan dalam rangka

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975.

³⁵ Aristo M.A.Pangaribuan,dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2017), 101-104.

	pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	mempercepat proses penyidikan.
3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi	Mengatur mengenai kewajiban perusahaan jasa telekomunikasi untuk menyimpan data-data Komunikasi serta perekaman terhadap data Komunikasi yang dilakukan oleh penggunaannya, sebagai bukti penggunaan Fasilitas jasa telekomunikasi dan atau untuk keperluan peradilan pidana.
4.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hanya mengatur pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan Penyadapan, pengaturan lebih spesifik diatur dalam SOP (standartd Operating Procedure) KPK yang bersifat rahasia.
5.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Mengatur mengenai perlindungan terhadap atas Komunikasi elektronik serta hak atas kerahasiaan hubungan advokat dengan kliennya.
6.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan terkait tindak pidana perdagangan orang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan izin tertulis kepada ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7.	Undang-Undang Nomor	Mengatur tentang larangan penyadapan,

- 2) Tindak pidana serius sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana terhadap keamanan negara, perampasan kemerdekaan /penculikan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, perdagangan orang, penyelundupn, korupsi, pencucian uang, pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan peledak dan senjata api, terorisme, pelanggaran berat HAM, psikotropika dan narkotika, pemerkosaan, pembunuhan, penambangan tanpa izin, penangkapan ikan tanpa izin di perairan, pembalakan liar.
- 3) Penyadapan sebagaimana tertera pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- 4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan,dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan di lakukan penyadapan tersebut.
- 5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyandapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di berikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin tersebut.

Namun demikian, Rancangan KUHP memberikan kemungkinan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana tertentu yang di sebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) Rancangan KUHP dengan beberapa syarat.

Terhadap 20 (dua puluh) tindak pidana serius yang diperbolehkan untuk dilakukannya tindakan penyandapan, seluruhnya harus mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, bahkan termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP sebagai berikut:

[illegible]

BAB IV

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).¹

Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. OTT itu sendiri tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP mengatur penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.

OTT adalah istilah yang mengandung makna kontradiksi atau berlawanan, dan mengacaukan istilah hukum.² Demikian pula menurut Hibnu Nugroho, Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman, Poerwokerto, OTT adalah istilah yang tidak tepat dan tidak diatur dalam Pasal 1 ayat 19

¹ Lilik Mulyadi, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2011), 8.

² <http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>, (diakses tanggal 25 November 2018, 16:40)

Contoh Kasus Walikota tegal Siti Masito ditetapkan sebagai tersangka operasi tangkap tangan KPK. Walikota tegal Siti Masito ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Selasa (29/8/2017) di kediaman Walikota tersebut.

Di dalam kasusnya Siti Masito di tangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. yang dilakukan pada Selasa (29/8/2017) di kediamannya tersebut. KPK mendapatkan barang bukti yang didapat dari hasil OTT. Siti Masitha menikmati uang Suap, sekitar Rp 500 juta, akan tetapi pihak KPK tetap meneruskan upaya pengebakan dan penyedapan untuk memperbanyak barang bukti sampai keranah pengadilan, tanpa melimpahkan ke pihak polisi.

Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam

[illegible]

kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan OTT patut dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan orang secara sewenang-wenang.

Terkait prosedur atau tahapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indonesia, yaitu ketika Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dit Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Saat tim pulbaket bekerja dan ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi transaksi, maka mereka melaporkan ke pimpinan KPK. Lalu, pimpinan bertemu dengan Direktorat Penyelidikan KPK dan melakukan gelar perkara. Baru di keluarkan sprindik (surat perintah penyelidikan).

Langkah yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di dikeluarkan itu menyangkup, Penyelidikan, peyidikan dan penuntutan bisa dengan melakukan penyadapan.⁵

Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan "kerah putih" (extraordinary crime) sangat sulit untuk menemukan

⁵ <https://jppn.com>”KPK Beberkan Cara Lakukan OTT “(diakses pada 12 September 2017 pukul 06:32 WIB).

buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga, salah satunya adalah dengan cara penyadapan.

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

B. Analisis hukum pidana Islam terhadap penyadapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi. sering di barengi dengan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di dalam nya terdapat penyandapan dan pengebakan.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَطْلُبُوهُ فَاَقْتُلُوهُ)) قَالَ: فُسِّبَتْهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَاحِدًا ثُمَّ سَلَبَهُ

فُنْقِلْنِي أَيَّاهُ (رَوَاهُ: سَلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْأَكْوَيْ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Salamah bin Al Akwa'dari ayahnya,ia berkata: telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad saw. dan ia sedang dalam perjalanan, kemudian ia duduk di sisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi Muhammad saw. berkata: carilah dia dan bunuhlah. Salamah bin Al Akwa'berkata: kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan. (HR Salamah bin Amru bin al Akwa)⁹

Dari paparan di atas bahwa *tajassus* atau memata-matai dilarang oleh islam hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahulu.

Pelaku *tajassus* (memata-matai) akan terkena sanksi *ta'zir*. sebagai mana yang telah di jelaskan diatas bahwa sanksi *ta'zir* untuk pelaku *tajassus* ,yaitu hukuman mati.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.¹⁰

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya di berikan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamana, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah

⁹ Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, Sunan Abu Dawud cet 1 bab jihat Hadits Nomor 110 (Bairut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah,1996M), 203.

¹⁰ Ibid., 147.

Hal tersebut dikarenakan agar KPK dapat terhindar dari perlawanan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa dari penghilangan barang bukti. Dan penyadapan dapat dilakukan dengan tujuan agar terhindari dari upaya terdakwa untuk membantah barang bukti dengan cara menghilangkan barang bukti tersebut.

Jadi penyadapan menurut kaidah istihsan diperbolehkan dengan tujuan agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti melakukan tindak pidana.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu diawali dengan adanya pengaduan masyarakat, setelah KPK mendapat aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Langkah yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di keluarkan itu mencakup, penyelidikan, peyidikan dan penuntutan bisa dengan melakukan penyadapan. Berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. KPK berwenang malakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya di dasarkan pada keterangan atau sumber yang jelas, karena jika tidak bisa menunjukkan keterangan atau sumber yang jelas, maka penyandapan yang dilakukan akan berdampak pada pelanggaran HAM.
2. Menurut hukum pidana Islam penyadapan termasuk jarimah tajassus sebab perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan dapat dikenakan sanksi dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun *tajassus* boleh dikakukan asalkan ada kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam konteks penegakan hukum, penyandapan yang dilakukan oleh KPK apabila dipandang dari kaidah istihsan maka diperbolehkan dengan dasar agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap

bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti melakukan tindak pidana.

B.Saran

1. Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang masalah-masalah kewenangan khususnya di bidang hukum pidana Islam. Masalah-masalah ini perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan zaman dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif di Indonesia.
2. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa idealnya aturan terkait penyandapan diatur secara lebih rincilagi dengan alasan agar tidak timbul tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang akan melakukan penyadapan.

Hikmawati, Puteri. *“oprasi tangkap tangan dalam penanganan korupsi hand arrest operation in handling corruption case”*. jakarta :pusat penelitian badan keahlian DPR RI 2018.

<http://adriahman24.blogspot.sg/2016/01/kronologi-suap-kepada-akil-mochtar.html> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:21).

<http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>, (diakses tanggal 25 November 2018,16:40).

<http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>,
(diakses tanggal 25 November 2018,16:40).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5719ec2e3894a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uutipikor>(diakses tgl 25 November 2018,16:20).

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahliterlengkap.html> (diakses tgl 25 Agustus 2018,16:15).

<https://jppn.com>”*KPK Beberkan Cara Lakukan OTT*“(diakses pada 12 September 2017 pukul 06:32).

Humam, Ibnu Farh Al-Qadir, IV, t.t

KBBI, terdapat 3 (tiga) arti “Operasi “, yaitu:1) Bedah:2) Tindakan atau *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawwir. "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*" Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Masyrofah. "*fiqih jinayah*". jakarta, cetakan kedua 2014.

Moctar, Zainal Arifin Moctar. *“Lembaga Negara Lembaga Negara Independen”*. Depok, PT Raja grafindo Persada 2017.

Nurani, Yusni. *"kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari perspektif fiqh syasah"* surabaya; universitas islam negri sunan ampel 2018.

Nurul Irfan, Mukhammad. "*Fiqih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Pangaribuan, Aristo dkk. *“Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia”*, Jakarta. PT Raja Grafindo persada. 2017.

Qadir Audah, Abdul “*Ensklopedi Hukum Pidana Islam*”, Jilid 1, t.t

- Rizal Akbar, Muhammad. *“kebijakan kpk dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui oprasi tangkap tangan”*. bandar lampung ,unerfisitas lampung 2016.
- Seryawati, Deni, *“KPK Pemburu Koruptor”*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Shahih al-Bukhary, jus VII, hadis no. 5143.
- Shihab, Quraish. *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keseasian Al-Qur’an”*, Jakarta: Lentea Hati , 2003.
- Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *“Perihal Kaedah Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sulaiman Bin Asy’ats, Abu Dawud. Sunan Abu Dawud cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 110, Bairut–Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1996M.
- Sutendi, Adrian. *” Hukum Keuangan Negara”* . Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Undang – Undang nomor 1 tahun 2008 informasi dan Transaksi dan elektronik.
- Undang – Undang Pasal 1 ayat 19 KUHAP tentang Oprasi Tangkap Tangan.
- Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Pasal 12 ayat (1) Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2, dan Nomor 4250.
- Undang-Undang ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Rancangan KUHAP dan penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 31 Ayat 1.
- Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.
- Undang–Undang Pasal 1 Angka 2 Tentang Penyidikan KUHAP.
- Undang–Undang Pasal 2 ayat 18 tentang Oprasi Tangkap Tangan KUHAP.

